



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 170 TAHUN 2016**

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dan untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Pendayagunaan Aparatur Negara Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Birokrasi Bersih 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- b. mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- e. menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan dalam kerangka reformasi birokrasi.

KETIGA : Jangka waktu Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sampai dengan ditetapkan Agen Perubahan berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2. Mei 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Kota Padang
- 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 170 TAHUN 2016
TENTANG AGEN PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PADANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PADANG

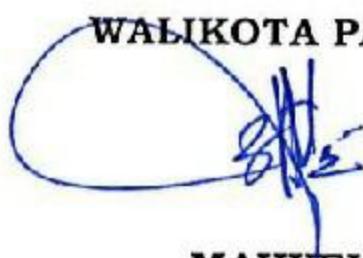
NO	SKPD	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Badan Kepegawaian Daerah	Drs. Fitri Abu Hasan	Kabid Pengendalian
2	Sekretariat DPRD	Drs. Y. Librafortunan, M.AP	Kabag Perisalah
3	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	T. Masfetrin, Spt. M.Si	Kabid Pengembangan dan Komunikasi Kelembagaan Lingkungan
4	Inspektorat	Ansoriudin, SP.M.Si	Auditor Madya
5	Bappeda	Afriyanni, S.STP, M.Sc	Kasubid Penelitian dan Pengembangan
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Ermiami, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Sandra Septa, SE. M.PubAdmin	Kasubid Potensi Penanaman Modal dan Promosi
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jufri Rahmad, SE. MM	Kasubid Akuntansi
9	Dinas Pendidikan	Yoszya Silawati, S.Pd., M.Si	Kepala UPT PKLK
10	Dinas Kesehatan	Nuraisah Pohan, SKM	Ka. Sie. Jamkesmas
11	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Mustafa Kamal, SE	Kasubag Program
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DR. Maiyulnita, SH. M.Si	Kabid Informasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Chandra Eka Putra, S.IP	Kasi Operasional Bidang Pengendalian dan Operasional
14	Dinas Pekerjaan Umum	Fadly Syahrial, ST. MT	Kabid Bina Program

NO	SKPD	NAMA	JABATAN KEDINASAN
15	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	Rido Satria, S.STP	Kabid Pengawasan dan Pengendalian
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Hj. Desnawati, SE	Kepala Seksi Pengembangan Usaha
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Desemberius, SE.MM	Kabid PK dan PBJ
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Sesriyokto, SE	Kasi Peningkatan Kompetensi Pemuda
19	Dinas Pendapatan Daerah	Drs. Ferri E. Rinaldy, MM	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan
20	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	Ir. Syahrial	Kepala Bidang Penyuluhan
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Otto Sarbi MT Damanik, S.Pd., M.Eng	Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Elvida SH. M.Si	Kasubag Keuangan
23	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Wiwi Nelza, ST. MT	Kasi Pengendalian Air Limbah Domestik
24	Dinas Pasar	Lilis Soraya, A.Md	Fungsional Pelaksana
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi, MT, M.Sc	Fungsional Pelaksana
26	Satpol-PP	Bambang Suprianto, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
27	Bagian Organisasi	Tuti Kurnia, SP., MM	Kasubag. Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
28	Bagian Organisasi	Abdi Putra Join, S.Kom., MAP	Kasubag. Ketatalaksanaan
29	Bagian Umum	Budi Kurniawan, SE	Kasubag TU Pimpinan dan Santel Setdako
30	Bagian Humas dan Protokol	Charlie Ch.Legi	Fungsional Pelaksana Bagian Humas dan Protokol
31	Bagian Perekonomian	Martalinda, BA	Kasubag Ekonomi Daerah

NO	SKPD	NAMA	JABATAN KEDINASAN
32	Bagian Pembangunan	Faisal Yunazar, ST. MS	Kasubag Pembinaan Administrasi Pembangunan
33	Bagian Kesra	Agustina, SH.MM	Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan
34	Bagian Pemerintahan	Dessy Fernita, SP	Fungsional Pelaksana
35	Bagian Pertanahan	Tabliq Nasution, S.IP, MM	Kasubag Administrasi Pertanahan
36	Bagian Hukum	Yopi Krislova, SH.MM	Kasubag Perundang-undangan
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Eri Jasman, S.Sos, MM	Kasubag Tata Usaha
38	Kantor Ketahanan Pangan	Ir. Helmiar Has, M.Si	Kasi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan
39	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	Restu Pramona, S.S	Plh. Kasi Pembinaan
40	Rumah Sakit Umum Daerah	Sofianita,SKM.MM	Kasubag Program
41	Kecamatan Padang Utara	Nasdwi Yelly, S.STP	Sekretaris Camat
42	Kecamatan Padang Timur	Hasan Asari, ST	Sekretaris Lurah Ganting Parak Gadang
43	Kecamatan Padang Barat	Imelda Novalin, SE, M.Si	Kasubag Umum
44	Kecamatan Padang Selatan	Roza Molina, S.STP, M.Si	Sekretaris Camat
45	Kecamatan Lubuk Kilangan	Sri Utari SB, SE	Kasubag Umum
46	Kecamatan Lubuk Begalung	Suwondo, S.Sos	Sekretaris Lurah Kelurahan Gates Nan XX
47	Kecamatan Pauh	Junie Nursyamza, S.STP,MPA	Sekretaris Camat
48	Kecamatan Kuranji	Yoga Natasha Amin, S.STP	Sekretaris Camat
49	Kecamatan Nanggalo	Rio Mirandi, S.STP	Kasubag Umum

NO	SKPD	NAMA	JABATAN KEDINASAN
50	Kecamatan Koto Tengah	Drs. Dasrelli	Pengadministrasi Kepegawaian Kecamatan Koto Tengah
51	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Drs. Zulkadri, M.Pd	Sekretaris Camat

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI